

Skripsi
PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN WILAYAH PESISIR
DESA PALA'LAKKANG KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR

Disusun dan diusulkan oleh

NUR RAHMA

Nomor Stambuk : 105640233615



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

**PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN WILAYAH PESISIR
DESA PALA'LAKKANG KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Drajat Sarjana

**Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan Diajukan Oleh:

NUR RAHMA

Nomor Stambuk : 105640233615

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Wilayah Pesisir
Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten
Takalar

Nama Mahasiswa : Nur Rahma

Nomor stambuk : 105640233615

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Mahsyar, M.Si


Dr. Abdi, M.Pd

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan


Dr. Hyani Malik, S.Sos. M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si



PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0037/FSP/A.3-VIII/VI/40/2019 sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Juni tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)

2. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

4. Dr. Abdi, M.Pd


()


()


()


()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Rahma

Nomor Stambuk : 105640233615

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 10 Juni 2019

Yang menyatakan

Nur Rahma

ABSTRAK

NUR RAHMA. 2019. Pembangunan ekonomi berkelanjutan wilayah pesisir Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. (dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Abdi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan wilayah pesisir Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk mengetahui faktor faktor pendukung dan penghambat Peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan wilayah pesisir Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan masyarakat pesisir di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar; a). Pemerataan; belum merata kesemua nelayan b). Partisipasi; masih perlu ditingkatkan karena masih kurangnya informasi kepada masyarakat terkait program pembangunan . c). Keanekaragaman; selain pemanfaatan sumber daya laut, masyarakat diberi program lain oleh pemerintah d), Spesifik jangka panjang; pemberian alat tangkap penyediaan ini sebagai tujuan jangka panjang. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar 1). *faktor pendukung*: (a). bantuan alat tangkap; bantuan bagi masyarakat berupa alat tangkap jaring, perahu fiber, mesin perahu dan kail pancing, bantuan yang diberikan ini tentu sangat membantu meningkatkan hasil tangkapan dan b). Tempat Pelelangan Ikan; Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional di beba dan Lanna yang disediakan untuk memfasilitasi kegiatan jual beli. 2). *Faktor Penghambat*: (a). Surat Izin ; masyarakat galesong selalu terkendala masalah surat izin berlayar ke Fak-fak Papua Barat khususnya para patorani. (b). Modal Usaha; bantuan modal yang diberikan tidak diikuti dengan aturan-aturan tentang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Kata Kunci : Pembangunan Berkelanjutan, Masyarakat Pesisir

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“ Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya khadirat Allah Swt. Atas rahmat dan taufik-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Wilayah Pesisir Desa Pala’lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar “dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat untuk mencapai Sarjana Ilmu Politik (S.IP). Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang takterhingga terkhusus kepada Pembimbing Dr. Abdul Mahsyar, M.Si dan Dr. Abdi, M.Pd sebagai Pembimbing, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan yang amat berharga sejak dari awal penulisan proposal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Do’a semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, beliau telah berperan sebagai orang tua akademik bagi penulis. Segenap

Dosen, Program Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini. Segenap staf tata usaha, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan atas bantuan serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat gandadari Allah Subhanahu Wataala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, 10 Juni 2019

Nur Rahma



DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Millenium Development Goalds (MDGs) dan Sustainable Development Goalds (SDGs).....	8
B. Pembangunan Berkelanjutan.....	11
C. Strategi Pembangunan Berkelanjutan	15
D. Pemberdayaan Masyarakat.....	16
E. Konsep Masyarakat Pesisir	18
F. Penelitian Terdahulu.....	21
G. Kerangka Konseptual.....	22
H. Fokus Penelitian	24
I. Desakripsi Penelitian.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	26
D. Informan	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	28
G. Teknik Pengabsahan Data	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
a. Kabupaten Takalar	31
b. Kecamatan Galesong.....	32
c. Desa Pala'lakkang.....	34
B. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Pesisir di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.....	37
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Bagi Masyarakat di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.....	46
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR

PUSTAKA	60
----------------------	----

LAMPIRAN	62
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan.....	27
Tabel 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Pala'lakkang.....	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir.....	24
Gambar 2 Peta Wilayah Kabupaten Takalar	31
Gambar 3 Peta wilayah kecamatan galesong	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang diketahui sebagai kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.508 pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil, terdapat berbagai potensi sumber daya pesisir dan laut yang cukup tinggi, Tetapi wilayah ini belum dikelola secara baik dan bertanggung jawab. Sehingga ada gejala yang ditimbulkan yang kurang baik, yaitu bagaimana carapemanfaatan dan pengeolaan sumber daya pesisir dan kelautan yang dampaknya dapat merusak keberlanjutan pemanfaatan potensi pesisir dan laut. Gejala tersebut antara lain: adanya berbagai pembangunan di wilayah pesisir yang mengakibatkan atau mempengaruhi terjadinya tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut, kekurangan kemampuan mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan banyaknya kegiatan ekstraktif yang didominasi oleh kepentingan dan pertimbangan ekonomi (Tuwo, 2011).

Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan terjadinya degradasi lingkungan dan kerusakan yang nyata terhadap kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Secara garis besar gejala dan kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian sumber daya pesisir di Indonesia meliputi: pencemaran, degradasi fisik habitat, over-eksploitasi, dan abrasi pantai.

Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan pesisir dan kelautan ini paling dirasakan oleh masyarakat yang menghuni wilayah pesisir, Mayoritas masyarakat merupakan masyarakat nelayan yang menggantungkan kehidupan

perekonomian mereka pada sumber daya pesisir. Terjadinya Kerusakan ekosistem pesisir dan laut tentu ini akan mengakibatkan penghasilan para masyarakat nelayan semakin jauh berkurang. Berkurangnya penghasilan tangkapan masyarakat ini tentu sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian dan mutu sebagai nelayan yang bisa jadi berimbas pada perekonomian mereka yang tidak stabil. Kemiskinan ini seringkali memaksa masyarakat nelayan untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan dan kelautan dengan perilaku yang kurang baik pada ekosistem laut, seperti misalnya penebangan hutan bakau, penambangan batu karang, ataupun penangkapan ikan dengan alat tangkap ilegal yang merusak lingkungan.

Berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir telah dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Namun, upaya-upaya yang telah diterapkan tersebut masih belum efektif terutama dalam merubah pandangan masyarakat sebagai fokus utama pembangunan. Apalagi sebagian besar program berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan dominasi peran birokrasi dalam pembangunan. Birokrasi menjadi aktor utama dalam perencanaan, Pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan. Pendekatan pembangunan dengan model ini mengakibatkan terjadinya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah yang diimplementasikan melalui program yang dibuat. Beberapa program pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat, pada kenyataannya cenderung mengalami kegagalan dimana masyarakat cenderung hanya diposisikan sebagai objek pembangunan.

Dalam pembangunan pengelolaan sumber daya alam belum optimal dilihat dari tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat nelayan sekarang ini. Salah satu

faktor penyebab adalah rendahnya pendidikan di masyarakat nelayan, kurangnya pengetahuan teknologi indeks pembangunan manusia (IPM). Dari hasil perhitungan, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Takalar tahun 2014 sebesar 63,53, meningkat menjadi 64,07 pada tahun 2015. Meskipun komponen mengalami peningkatan, pemerintah khususnya masih memerlukan konsep untuk meningkatkan pendidikan masyarakat (BPS Kab.Taklar 2016).

Akhir-akhir ini konsep pembangunan yang sangat di kenal adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs), sebagai pengganti *Millinium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada 2015 lalu. Di era MDGs untuk mengetahui kebutuhan orang miskin dalam pembangunan berkelanjutan (Fausi dan Octavianus, 2014).

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan suatu daerah yang memiliki prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa melibatkan generasi yang akan datang. Pembangunan sering juga dikatakan sebagai perbaikan kualitas hidup dengan disesuaikan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam proses pembangunan memanfaatkan sumber daya alam pembangunan yang dilakukan harus memberikan cerminan yang tidak merusak lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa tujuan, diantaranya mensejahterakan kehidupan masyarakat, mengatasi kemiskinan yang ada di setiap daerah, pendidikan yang berkualitas, ekosistem laut, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, air bersih dan sanitasi layak, menyebarkan pertumbuhan ekonomi yang baik hingga membuka lapangan kerja untuk seluruh masyarakat.

Pembangunan penghasilan masyarakat pesisir yang berbasis sumber daya alam yang tidak berimbang pada lingkungan yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah itu sendiri, oleh karena itu pengembangan SDA haruslah memiliki kapasitas yang terbatas. Dengan kata lain pembangunan ekonomi berkelanjutan haruslah berkesesuaian dengan lingkungan (Rahadian, 2016).

Masyarakat pesisir merupakan sekelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai dan sebagian besar berpenghasilan sebagai nelayan. Masyarakat yang hidup di pemukiman pesisir memiliki karakteristik sosial secara ekonomis sangat terkait dengan perekonomian dari laut. Demikian pula pendapatan yang berdasar pada sumber daya alam di pesisir pantai seperti nelayan, petani ikan, pekerja industri. Masyarakat industri yang didominasi perikanan pada umumnya masih pada garis kemiskinan, karena mereka tidak memiliki mata pencaharian lain, tingkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang kurang sehingga tidak mengetahui kelestarian sumber daya alam dan lingkungan berpengaruh terhadap perekonomian mereka (Lewaherilla, 2002).

Dalam kehidupan sosial ekonomi tidak hanya menyangkut perubahan dalam perbaikan kehidupan masyarakat, akan tetapi juga mengedepankan pembagian-pembagian kebaikan. Dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi beberapa faktor memengaruhi tingkat kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Disatu pihak kehidupan sosial ekonomi dalam usahanya tidak sepenuhnya menanggulangi hambatan sosial yang ada. Hal ini menunjukkan suatu

proses yang memiliki keanekaragaman kebutuhan dimana dalam kenyataannya hanya sebagian kecil dari masyarakat yang peduli untuk meringankan beban sesama manusia.

Demikian halnya dengan masyarakat pesisir Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, dimana sebagian besar masyarakatnya bergantung hidupnya sebagai nelayan. Perairan pantai galesong sangat mendukung usaha nelayan dalam penangkapan ikan sebagai sumber pencahariannya sebagian penduduk masyarakat berpencaharian sebagai nelayan yang turun temurun dari nenek moyang mereka. Karakteristik nelayan berbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang dimilikinya, sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal nelayan harus berpindah-pindah tempat dalam mencari. Seperti masyarakat kebanyakan, masyarakat nelayan juga menghadapi masalah sosial ekonomi yang banyak. Pemanfaatan potensi laut yang ada menjadi kebiasaan masyarakat pesisir dalam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Peran pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan yaitu, pembangunan yang berbasis masyarakat dengan memberikan berbagai bantuan berupa perahu piber untuk masyarakat nelayan, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pelatihan wirausaha dalam mengelola hasil laut yang di dapatkan oleh masyarakat nelayan yang berada di wilayah pesisir pantai Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan masalah diatas sehingga peneliti tertarik mengambil judul penelitian; **“Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Wilayah Pesisir Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar ?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dilakukan untuk sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan masyarakat pesisir di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mempertajam dan mengembangkan teori yang ada di dunia akademis mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Pemerintahan

Memberikan masukan pada pemerintah setempat agar mampu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memperbaiki mutu kehidupan khususnya peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

b. Bagi Penulis

Karya inilah salah satu kontribusi nilai pengetahuan yang didapat di bangku kuliah dengan mengkaji lebih jauh tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Millenium Development Goalds (MDGs) Dan Sustainable Development Goalds (SDGs)

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan sebuah deklarasi oleh milenium yang dihasilkan dari kesepakatan antara kepala negara beserta beserta perwakilan dari 189 anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) di New York AS yang selanjutnya dijalankan pada bulan september tahun 2000, pemerintah Indonesia ikut serta dalam pertemuan puncak millennium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Kemudian deklarasi yang berisi komitmen Negara secara bersama dan komunitas internasional dapat menyetujui delapan tujuan pembangunan dalam millennium ini (Wahyuningsi, 2017).

Ada delapan tujuan *Millenium Development Goals* yaitu: (1). Menangani kemiskinan serta kelaparan, (2). Mencapai pendidikan dasar untuk semua kalangan, (3). Mendorong kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, (4). Menurunkan angka kematian pada anak, (5). Meningkatkan kesehatan ibu, (6). Memerangi penyakit HIV/AIDs, malaria serta penyakit menular lainnya, (7). Memastikan kelestarian lingkungan hidup, (8). Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Pembangunan era millenium yang sudah di deklarasikan, di kenal dengan *Millenium Development Goalds* (MDGs), dan deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan negara maju. Negara-negara yang hadir pada deklarsi tersebut berkewajiban untuk

melaksanakannya, begitu juga dengan Indonesia dimana kegiatan MDGs, mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi MDGs. Kemudian negara-negara yang sudah dinilai negara maju berkewajiban mendukung dan memotivasi dan memberi bantuan terhadap keberhasilan setiap tujuan dan target yang ingin dicapai MDGs.

Delapan tujuan tersebut bila melihat pencapaian pembangunan yang sudah mencapai batas waktu yakni tahun 2015, masih banyak yang belum tercapai sepenuhnya, adapun pelaksanaan kebijakan yang berlandaskan pada MDGs ternyata mendapat sorotan dan kritikan. Kiritikan tersebut antara lain:

Tujuan dan target MDGs disusun melalui proses yang sangat birokrasi dan teknokasi.

1. Desain dari tujuan dan target tersebut juga di kritik berbagai oleh beragam pendapat.
2. Tujuan, target dan indikator yang ada merefleksikan fokus area dan data yang diasumsikan tersedia, namun dalam beberapa kasus data tersebut tidak lengkap atau bahkan tidak ada.
3. Kurangnya akuntabilitas dan universitas terutama untuk negara-negara donor dalam memenuhi tujuan ke 8 MDGs.

Setelah era MDGs yang sudah berakhir pada tahun 2015, kini telah disusun dokumen pembangunan baru untuk melanjutkan tujuan-tujuan yang belum sempat tercapai sembari menyempurnakan target-target yang lebih relevan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu pembangunan pasca tahun 2015 mulai disusun dengan mengatasi hambatan-

hambatan untuk memajukan pembangunan termasuk soal ketimpangan, tata kelola yang efektif dan inklusif, masyarakat damai dengan beberapa persoalan lain. Peyempurnaan tersebut melahirkan tujuan dan target yang tersusun dalam 17 poin tujuan dan 169 sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan berlaku hingga 2030 mendatang (Wahyuningsi, 2017).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi patokan dalam rangka membangun dan perundingan negara-negara di dunia sebagai pengganti *Millinium Development Goals* (MDGs) yang berakhir padatahun 2015 lalu.

Sustainable Development Goalds (SDGs) di rancang sebagai kelanjutan dari *Millenium Development Goalds* (MDGs), yang belum tercapai tujuannya sampai pada akhitr tahun 2015. SDGs diharapkan dapat berkontribusi terhadap umat manusia dan kemakmuran dan yang terpenting adalah memperkuat perdamaian bagi semia masyarakat internasional dalam kebebasan yang luas kemudian diharapkan dapat mengatasi kemiskinandalam tantangan global saat ini yang paling besar dan merupakan prasyarat yang tidak dapat dilanjutkan untuk pembangunan berkelanjutan (Bappenas, 2015).

Sustainable Development Goalds (SDGs) sebagai pengganti *Millinium Development Goalds* (MDGs) telah disepakati pada tahun 2015. SDGs merupakan sejarah baru dalam pembangunan, dan tentu sangat diharapkan bagi semua negara dalamkesepakatan SDGs dalam pertemuan atau sidang umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) ke 70 memiliki tujuan pembangunan universal baru yang dimulai pada tahun 2016 sampai tahun 2030.

Ada lima prinsip mendasar SDGs yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yaitu manusia, bumi, perdamaian, kerjasama dan kemakmuran. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran, berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 7 tujuan dan 21 sasaran secara proses MDGs memiliki kekurangan dalam penyusunan sampai pengimplementasian bersifat eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran non-pemerintah, seperti civil society organization, sektor bisnis swasta, serta kelompok lainnya yang ada di Indonesia (Penuluh dan Fitri 2016).

Ada tujuh belas, tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu: 1). Tanpa Kemiskinan, 2). Tanpa kelaparan, 3). Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, 4). Pendidikan berkualitas, 5). Kesenjangan gender, 6). Air bersih dan sanitasi, 7). Energi bersih dan terjangkau, 8). Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, 9). Industri, inovasi dan Infrastruktur, 10). Mengurangi kesenjangan, 11). Keberlanjutan kota dan komunitas, 12). Konsumsi dan produksi bertanggung jawab, 13). Aksi terhadap iklim, 14). Kehidupan bawah laut, 15). Kehidupan di darat, 16). Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, 17). Kemitraan untuk mencapai tujuan.

B. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan usaha manusia untuk memperbaiki kehidupannya sekarang tanpa mengorbankan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan menurut Email (2006), adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Hakekatnya

pembangunan berkelanjutan di tujukan kepada generasi sekarang maupun masa akan datang.

Pembangunan yang berkelanjutan adalah sebuah proses pembangunan dan pertumbuhan yang memiliki prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan (Brutland 2001). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang berpatokan kepada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang harus memperhatikan lingkungannya.

Sutamihardja (2004) mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk terjadinya:

1. Penjagaan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dan pencegahan terjadinya gangguan ekosistem dalam menjamin kualitas kehidupan yang baik untuk generasi masa depan.
2. Mempertahankan masa depan masyarakat yang berkelanjutan sejak masa sekarang maupun masa yang akan datang.
3. Mempertahankan manfaat pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak positif dalam jangka panjang.
4. Menjaga kualitas kehidupan manusia dari generasi ke generasi.

Pandangan ekonomi menurut Fauzi (2004) mengatakan ada tiga alasan pokok pembangunan ekonomi harus berkelanjutan.

1. Moral

Yang dinikmati generasi sekarang apa yang dinikmati saat ini baik jasa dan abrang yang telah di hasilkan oleh sumber daya yang tersedia dihasilkan secara moral sehingga harus diperhatikan kesediaan sumber daya alam itu harus mampu

menjaga jangan sampai sumber daya dirusak dan tidak bertanggungjawab dalam pengelolaannya sehingga mendatang untuk menikmati layana yang sama.

2. Ekologi

Keanekaragaman hayati, memiliki nilai oleh karena itu aktifitas ekonomi tidak seharusnya dibawa ke dalam kegiatan lingkungan dan sumber daya alam yang pada akhirnya mengancam ekologi.

3. Ekonomi

Ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga aspek keberlanjutan darai sisi ekonomi ini hanaya di batasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi.

Menurut KLH (2012), pembangunan (padadasarnya lebih berorientasi pada perekonomian) bisa diukir dengan tiga hal yaitu : (1) penggunaan sumber daya alam yang tidak boros *depletion of natural resources*; (2). Tidak ada lagi dampak lingkungan dan polusi, (3). Harus dapat meningkatkan kegiatan useable *resource-sataupun replaceable resource*.

Senada pada konsep yang di atas Sutamihaja (2004) mengatakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan merangkap kepada usaha dalam mewujudkannya agar terjadi: (a). Meratakan pemanfaatan hasil dari kegiatan pembagunan antara generasi (*intergeneratiion aquity*)yang artinya adalah pemanfaatann hayati (sumber daya lam) demi kebutuhan perkembangan harus memperhatikanya batas - batas wajar didalam masalah sistem lingkungan atau ekosistem bahkan diajarkan kepada hayati (sumber daya alam) yang *replaceablle* serta menekan eksploitasi sumber

daya lama atau hayati serendah mungkin dan yang *unreplaceable*, (b). *Safeguarding* pencegahan dan menjaga kerusakan ekosistem dan sumber daya alam (c). Pengelolaan serta pemanfaatan hayati hanya untuk kepentingan ekonomi saja dan demi kepentingannya serta pemanfaatan sumber hayati berkelanjutan (d). Untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat dalam masa kini ataupun masa yang akan datang (e). Pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam (hayati) harus dipertahankan untuk kelangsungan generasi (f). Kualitas kehidupan manusia dan habitusnya yang harus dijaga demi mempertahankan mutu dan kelestariannya. Pada sisi ekonomi Fauzi (2004), ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan.

- a) Sesuai dengan alasan yang telah menyangkut dalam moral, generasi saat ini telah menikmati barang dan jasa dari sumberdaya alam, serta lingkungan. Oleh karena itu perlu memperhatikan nilai moral untuk mempertahankan sumber daya alam tersebut. Kewajiban yang tidak mengekstraksi sumberdaya alam, yang bias mengilangkan kesempatan generasi akan datang untuk menikmatinya.
- b) Karena alasan ekologi, contoh keanekaragaman hayati misalnya, telah mempunyai penilaian ekologi yang begitu tinggi dan oleh karena itu seharusnya kegiatan ekonomi tidak perlu dimasukkan dalam kegiatan dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan yang pada akhirnya telah mengancam kelangsungan ekologis.
- c) Alasan ekonomilah yang menjadi alasan memang pada sisi ini masih menjadi perdebatan apakah sudah atau belum memenuhi kriteria ekonomi yang berlanjut seperti yang kita ketahui saat ini, sementara ekonomi berkelanjutan

memiliki dimensi yang komplit, akibatnya aspek dari ekonomi berkelanjutan yang menjadi pengukurann kesejahteraan antara generasi (*intergeneerration welfare maximiization*).

C. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga mampu memenuhi kemauan dan kebutuhan rakyat, pembangunan berkelanjutan sesungguhnya ditujukan untuk meratakan pmbangunan dianatra masa kini dan masa untuk yang akan datang Elang (2003).

Dari sekian banyak konsep tentang pembangunan berkelanjutan maka telah di rumuskan 4 elemen di antaranya yaitu : (4) komponen yang patut untuk diperhatikan; 1. Pemerataan, 2. Partisipasi, 3. Keanekaragaman, 4. Pesifik jangka panjang, dan intregasi Pembangunan keadilan sosial pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti; (a) faktor distribusi dan industri sumber lahan yang merata, (b) kesempatan perempuan dan peranya yang merata (c) Keseimbangan distribusi dan ekonomi yang di capai telah merata di berbagai aspek. Pemerataan yaitu sebuah konsep yang begitu bagus dan relative serta tidak dapat di ukur ukuran etika pembangunan yang kelanjutan merupakan suatu hal yang telah merata, sehingga kesenjangan antar pendapatan negara yang miskin dan kaya semakin meluas, meskipun peningkatan pemertaan di negara telah meluas.

1. Pembangunan yang menghargai keanekaragaman untuk pemeliharaan sumber daya alam yang hidup atau hayati merupakan syarat untuk memastikan tersedianya sumber daya alam secara berkelanjutan untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Keanekaragaman sumber daya alam (hayati) yang ada juga dasar bagi keseimbangan ekosistem.
2. Pembangunan yang lebih integratif adalah contoh kegiatan pembangunan yang telah biasa dimungkinkan. Hal inilah termasuk masalah atau tantangan pertama di dalam lembaga. Pembangunan yang menggunakan pendekatan integrative mengutamakan keterkaitan antara alam dan manusia merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Cara manusia mempengaruhi alam yaitu dengan cara menjaga atau merusak hanya dengan menggunakan arti tentang kompleksnya hubungan antara sistem sosial dan sistem alam.
3. Pembangunan perspektif jangka panjang bagi rakyat dominan menilai masa sekarang yang telah lebih dari masa depan, dampak dari pembangunan yang berkelanjutan menjadi masalah yang telah mendasari nilai lain. Pandangan pandangan dalam jangka panjang merupakan pandangan pembangunan berkelanjutan sehingga sekarang ini konsep jangka pendek lebih banyak pemikir para pengambil keputusan perekonomian, maka dari itu harus dipertimbangkan

D. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konseptual ini telah menjelaskan pandangan yang

baru didalam kegiatan pembangunan “*people-centered, partisipatory, empowering, and sustainable*” (Chambers,1995 dalam Kartasasmita, 1996).

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses pertumbuhan dalam perkembangan rakyat untuk terlibat didalam aspek-aspek pembangunan pada setiap wilayah. Untuk pemberdayaan ada tiga pendekatan dalam masyarakat yang dilakukan yaitu: 1). Mobilisasi (*Community mobilization*), 2). Partisipasi masyarakat (*Community participation*), 3). Pembangunan berbasis masyarakat (*Community development*)

Inti dari konsep ini adalah untuk memandirikan masyarakat serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, rakyat tidak cuma ikut aktif dalam kegiatan pembanguan dan penerima saja. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah bentuk perbuatan untuk membebaskan diri mereka dari gantungan fisik dan fisik. Partisipasi masyarakat menjadi bagian utama distrateegi pembangunan dan pemberdayaan masyarkat dengan alasan pasrtisipasi masyarakat adalah perangkat yang ampuh untuk sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan dan kreatifitas masyarakat (Madekhan, 2007)

Menurut Moh Ali Asis, dkk (2005), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya didalam mengembangkan kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat adalah acara atau proses siklus yang berkelanjutan, partisipasi antara masyarakat yang bekerja sama

didalam golongan informal maupun formal untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman dan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekedar proses semata.

Kartasmita (1996), Mengangkat harkat dan martabat, serta mengatasi dari ketidak tergantungan merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, dan merupakan satu konsep pembangunan ekonomi yang mengikuti aturan nilai sosial.

Tujuan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah mewujudkan susunan perekonomian daerah atau negara yang berdasarkan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya alam.

E. Konsep Masyarakat Pesisir

Hingga saat ini masih tidak ada pengertian atau definisi daerah pesisir yang betul, tetapi ada kesepakatan dari berbagai negara bahwa daerah pesisir merupakan wilayah perpindahan (*interfaccearea*) di antara laut dan daratan ekosistem. Definisi serta batasan daerah atau wilayah pesisir yang telah digunakan di negara yaitu daerah dimana lautan berbatasan dengan daratan, batas ke arah darat meliputi:

- 1). Berdasarkan ekologi: daerah daratan yang masih dipengaruhi dengan proses kelautan contohnya surut pasang, angin laut, serta, intrusi air laut;
- 2). Berdasarkan administrasi: batasan luar disebelah hulu dari pedesaan pantai dan jarak definitif secara arbiter 2 km dari garis pantai, sedangkan batas ke arah laut meliputi:

- a) Berdasarkan ekologi: Daerah lautan yang telah masih berpengaruh atau di pengaruhi dengan proses alamiah didalam daratan contohnya sedimen serta mengalirnya air tawar ke laut, hingga kegiatan-kegiatan manusia yang memengaruhi laut;
- b) Secara administrasi: batas 4 mil dari garis pantai ke arah laut.

Adapun masyarakat pesisir adalah sekelompok warga atau masyarakat yang bermukim di daerah pesisir yang memiliki landasan hukum dan peraturan serta hak-hak yang harus di penuhi. Menurut kelompok atau golongan mata pencaharian dan tempat tinggal maka bisa ditetapkan sebuah kelompok masyarakat nelayan ikan, petani rumput laut, industry kapal dan industri maritim galangan kapal.

Peranan sumber daya masyarakat pesisir telah ditargetkan akan terus meningkat pada masa-masa yang akan mendatang untuk mengangkat pembangunan perekonomian nasional, regional, maupun dalam local, pendukung hal di atas yaitu :

- 1). Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang akan mendorong permintaan masyarakat pesisir.
- 2). Indonesia telah memiliki berbagai sumber daya pesisir serta laut yang sangat beragam-ragam didalam jumlah yang begitu besar dan secara komparatif.

Maka dari itulah di terapkanlah strategi pembangunan industri yang berbasis sumber daya alam yang telah di bangun melalui penerapan iptek dan manajemen profesional, sehingga kita harus mengetahui kekayaan yang tersimpn di pesisir dan laut sebagai aset untuk pembangunan yang dapat menggerakan perekonomian.

Dahuri (2003) Terdapat satu atau lebih ekosistem sumberdaya di daerah pesisir, telah dia rumuskan yang bersifat buatan ataupun alami. Salah satu ekosistem alami yang ada di laut yaitu terumbu karang, rumput laut, delta dan lain sebagainya, sementara ekosistem buatanya yaitu : sawah pasang surut, tambak dan lain sebagainya. Pandangan yang baru dalam pembangunan Indonesia berbasis kelautan, Orasi guru besar Institute Pertanian Bogor tentang laut dan ilmu pemberdayaan pesisir. Sumber daya di bahwasanya pesisir dan lautan terdapat dua sumber daya yaitu sumber daya yang dapat pulih dan yang tidak dapat pulih. Sumber daya yang dapat pulih yaitu (mangrove, sumberdaya lautan, padang lamun, terumbu karang, rumput laut, dan bahan bioaktif) sementara sumber daya tidak dapat pulih yaitu (minyak bumi, gas, mineral, dan bahan tambang lainnya) dan macam-macam energi lautan (angin, ocean, dan gelombang pasang surut) serta para jasa (pengaturan iklim, transportasi, dan komunikasi) seluruh ekosistem serta sumber daya ini dapat berpotensi untuk sebuah aset ekonomi, ekologis, penelitian dan pendidikan, pertahanan serta keamanan bagi suatu negara.

Keamanan dan pertahanan daerah pesisir bias diartikan sebagai peranan pesisir untuk memelihara keamanan negara terkhusus dipesisir pulau-pulau yang berbatasan dengan negara-negara lainnya. Sementara potensi penelitian dan pendidikan daerah pesisir biasa diartikan bahwa daerah pesisir mempunyai peranan untuk pembelajaran serta kegiatan-kegiatan riset untuk menopang pembangunan perekonomian (Bengen DG, 2004).

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian, ada beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian yaitu:

No	Nama Penulis	Judul/Tahun	Indicator
1	Niken Pratiwi, dkk	Analisis implementasi pembangunan berkelanjutan di Jawa timur	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi • Sosial, lingkungan • Kemajuan dan kemunduran
2	Farhan Ngoyo	Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs), meluruskan orientasi pembangunan yang berkeadilan/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Kesejahteraan • Keadilan dalam masyarakat
3	Yurial Arif Lubis	Studi tentang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir pantai pelabuhan/ 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi • Aktivitas

Sumber, Jurnal pembangunan berkelanjutan 2019

- 1) Dalam penelitian Niken Pratiwi membahas tentang analisis implementasi pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur dengan fokus indikator membahas ekonomi, sosial lingkungan, kemajuan dan kemunduran dalam aspek pembangunan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meningkatkan ekonomi berkelanjutan dan faktor yang pendukung dan penghambat di pesisir pantai Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

- 2) Dalam penelitian Farhan Ngoyo membahas tentang mengawal *Sustainable Development Goals (SDGs)* meluruskan orientasi pembangunan yang berkeadilan fokus indikator kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meningkatkan ekonomi berkelanjutan dan faktor yang pendukung dan penghambat di pesisir pantai Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.
- 3) Yurial Arif Lubis dalam penelitiannya fokus membahas aktivitas dan perekonomian masyarakat pesisir pantai pelabuhan sedangkan, penelitian yang akan dilakukan meningkatkan ekonomi berkelanjutan dan faktor yang pendukung dan penghambat di pesisir pantai Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

G. Kerangka Konseptual

Pembangunan berkelanjutan merupakan usaha masyarakat dalam membenahi taraf hidup dengan tetap berjuang atau usaha yang tidak berlebihan dari ekosistem yang telah mendukung kehidupannya. Saat ini permasalahan pembangunan berkelanjutan malah dijadikannya berita yang penting untuk selalu diajarkan pada masyarakat. Pengolaan daerah pinggiran pantai dengan terpadu mempunyai arti kalau pengolaan sumber daya alam atau hayati serta jasa lingkungan pesisir dilaksanakan berdasarkan penilain yang merata (*comprehensive assesment*), memutuskan atau menentukan sasaran pemanfaatan dan tujuan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya.

Tidak hanya menyangkut kehidupan sosial ekonomi dan perubahan dalam perbaikan kehidupan masyarakat, akan tetapi juga mengedepankan pembagian-pembagian kebaikan. Dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi beberapa

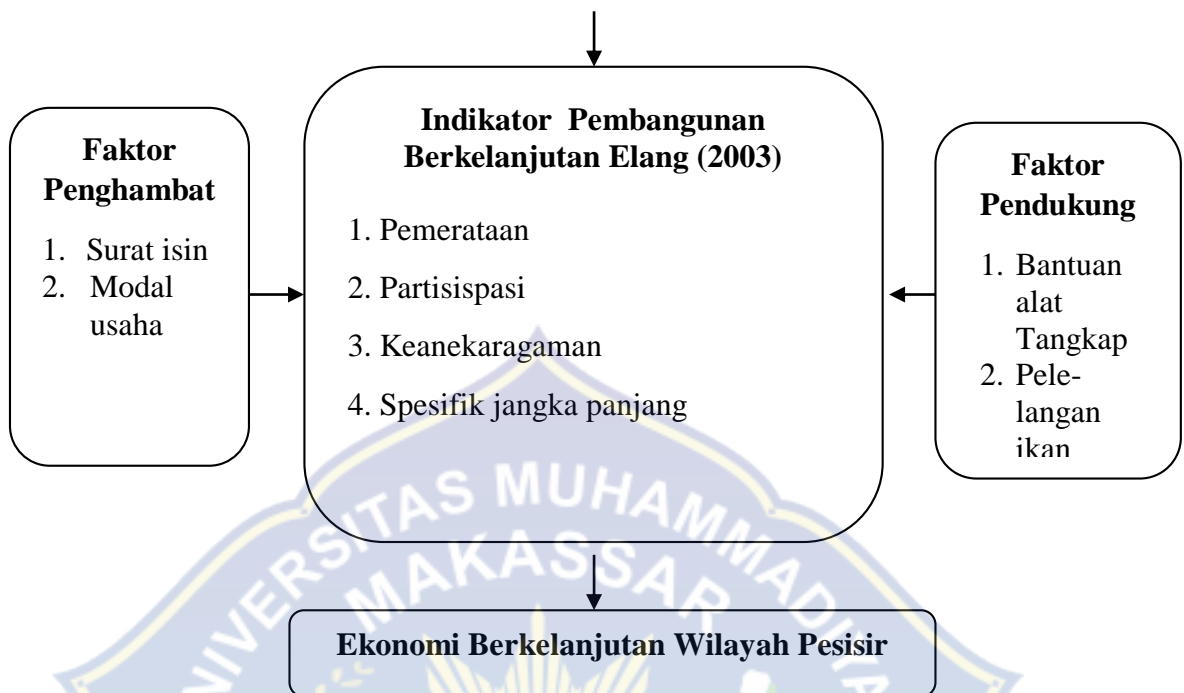
faktor mempengaruhi tingkat kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Demikian halnya dengan masyarakat pesisir Desa Pala'lakkang Galesong Kabupaten Takalar, dimana sebagian masyarakatnya menggantungkan hidupnya sebagai nelayan sehingga sangat diperlukan untuk ditingkatkan mutu kehidupannya lebih baik.

Dari sekian banyak konsep tentang pembangunan berkelanjutan, (Elang, 2003) menyatakan 4 indikator dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu:

- a). Pemerataan yang kami maksudkan disini adalah pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah diperoleh secara umum bagi masyarakat pesisir.
- b). Partisipasi, keterlibatan yang aktif dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan agar sesuai dengan tujuan pembangunan.
- c). Keanekaragaman adalah banyaknya program/strategi yang diberikan pemerintah bagi masyarakat pesisir baik bantuan barang dan jasa sehingga mampu meningkatkan sejahtera secara ekonomi.
- d). Spesifik jangka panjang yang kami maksudkan pembangunan yang dilakukan terus menerus jangka panjang untuk generasi berikutnya sebagai masyarakat nelayan.

Dari uraian di atas, maka kerangka pemikirannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Wilayah Pesisir Desa
Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar**



Gambar : 1 Bagan Kerangka Pikir

H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu: meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan faktor yang pendukung dan penghambat di pesisir pantai Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

I. Deskripsi penelitian

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dapat dilihat dari:
 - a). Pemerataan yang kami maksudkan disini adalah pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah diperoleh secara umum bagi masyarakat pesisir.
 - b). Partisipasi, keterlibatan yang aktif dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan agar sesuai dengan tujuan pembangunan.
 - c). Keanekaragaman adalah banyaknya program/strategi yang diberikan pemerintah bagi masyarakat pesisir baik bantuan barang dan jasa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi.
 - d). Spesifik jangka panjang yang kami maksudkan pembangunan yang dilakukan terus menerus jangka panjang untuk generasi berikutnya sebagai masyarakat pesisir.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, karena sebagai objek pembangunan ekonomi berkelanjutan masyarakat pesisir masih ditemukan beberapa permasalahan-permasalahan yang perlu diperbaiki dan layak untuk diangkat menjadi sebuah kajian dengan harapan dapat diurai permasalahan tersebut dan dicari jalan penyelesaiannya. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan April sampai bulan Juni 2019.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Wilayah pesisir Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.
2. Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, menurut menjelaskan fenomologi yang artinya peneliti akan mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan berkaitan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan wilayah pesisir Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

C. Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh informasi untuk menerangkan dan memberi kejelasan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Data yang dapat diperoleh dari sumber data dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data primer

Merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian yaitu berupa hasil wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi atau pengamatan dari pemerintah setempat dan masyarakat.

2. Data sekunder

Adalah hasil data yang didapatkan dengan cara tidak langsung atau melalui pihak kedua dengan melakukan studi dokumentasi atau literatur kepustakaan yang berkaitan dengan yang diteliti.

D. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah ditentukan secara *purposive sampling* atau bertujuan dimana peneliti memilih informan atau responden secara sengaja, yaitu mereka yang dianggap berkompeten atau dianggap tahu pasti tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan wilayah pesisir pantai Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan

No	Nama/Inisial	Jabatan
1	AR	Sekcam
2	GS	Kepala Desa
3	AN	Kaur Keungan
4	JS	Masyarakat
5	MF	Masyarakat
6	ID	Masyarakat
7	PM	Masyarakat

Sumber: pengembangan informan terkait (2019).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses penelitian dengan cara tanya jawab dengan informan, kemudian antara peneliti dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) tujuan peneliti menggunakan teknik ini, untuk mendapatkan data yang valid tentang masalah yang diteliti.

2. Observasi Langsung

Observasi secara langsung yaitu metode pengambilan data mengamati secara langsung sesuatu yang berkaitan dengan yang diteliti, kemudian membandingkan referensi atau literatur yang ada dengan apa yang betul-betul yang terjadi dilapangan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui meneliti catatan-catatan yang penting dari peristiwa masa lampau. Sehingga menjadi pelengkap dari observasi yang peneliti lakukan sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menemukan serta menyusun dengan sistematis dengan cara pengumpulan melalui metodologi pencatatan ataupun dialektika yang diperoleh dari observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan melakukan sintesis menentukan yang utama serta yang mau

di pelajari, sampai membuat kesimpulan yang bisa dipahami oleh orang lain dan juga diri kita sendiri, untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis, model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas pada penganalisis data yang kualitatif dikerjakan dengan interaktif serta berlangsung dengan terus menerus hingga tuntas, kemudian sampai ditanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data, adalah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2011).

1. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Dengan memusatkan perhatian terhadap objek yang diteliti. Reduksi data terus berlangsung di lapangan sampai mendapatkan data yang lengkap.

2. *Data Display* (Penyajian Data).

Dapat dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Sehingga dapat memahami dengan mudah masalah penelitian dan dapat mengetahui apa selanjutnya yang akan dilakukan dalam penelitian.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan / Verifikasi).

Kesimpulan dalam penelitian selalu berubah-ubah, karena masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dapat berubah-ubah sampai setelah ditemukan bukti yang valid dan konsisten.

G. Teknik Pengabsahan Data

Sugiyono mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan untuk data. Menurut William Wiersma dalam Sugiyono

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara sehingga triangulasi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu dengan membandingkan melalui sumber berbeda sampai mendapatkan kebenaran.
- b. Triangulasi Teknik, yaitu menguji kreabilitas data yang dilakukan dengan cara menggunakan teknik yang berbeda namun cara mengecek data sumber yang sama.
- c. Triangulasi waktu, yaitu dengan melakukan wawancara, observasi atau dengan melakukan teknik lain dengan situasi dan waktu yang berbeda. Sampai mendapatkan kepastian data.



BAB IV

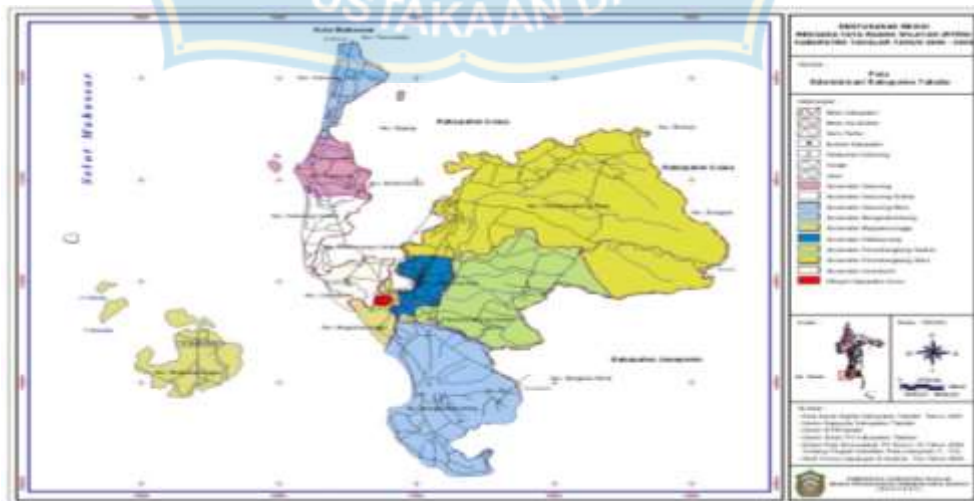
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kabupaten Takalar

Penelitian dilakukan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dari judul penelitian ini, namun perlu dijelaskan lokasi penelitian tradisi *patorani* lebih dalam. Berdasarkan peta diatas Kabupaten Takalar yang beribukota di pattallassangterletak antara 5P⁰P3'-5P⁰P38' Lintang Selatan dan 119P⁰P22'- 19P⁰P39' Bujur Timur. Disebelah timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah Barat dan Selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan laut Flores. Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km², terdiri dari 9 kecamatan dan 83 desa/kelurahan. Jarak ibu kota Kabupaten dengan ibukota provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 Km yang melalui Kabupaten Gowa.

Gambar. 2 Peta Wilayah Kabupaten Takalar



Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar hingga 2006 terdiri atas 7 Kecamatan, kemudian pada tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah menjadi 9 Kecamatan. Dua wilayah Kecamatan hasil pemekaran yaitu Sanrobone yang dimekarkan dari Kecamatan Mappakasunggu, dan Kecamatan Galesong yang dimekarkan dari Galesong Utara dan Galesong Selatan. Sumber data dari BPS Kabupaten Takalar, menunjukkan wilayah Kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Polongbangkeng utara dengan luas kurang lebih 212,25 Km² dengan persentase 37,47% dari luas Kabupaten Takalar.

Kemudian Galesong Selatan dengan luas 44,00 Km² dengan Persentase 7,77%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luasan yang terkecil yaitu Galesong Utara dengan luas wilayah kurang lebih 15,11 Km² dengan persentase 2,26% dari luas Kabupaten Takalar.

b. Kecamatan Galesong

Gambar. 3 Peta wilayah kecamatan galesong



1). Keadaan geografis

Galesong sebagai salah satu kecamatan yang terletak di sebelah selatan dan berjarak kurang lebih 17 kilometer dari ibukota Kabupaten Takalar. Ibu kota Kecamatan Galesong terletak di Desa Boddia yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Galesong Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Galesong Selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kemudian luas wilayah Kecamatan Galesong sekitar 25,93 Km² atau sebesar 4,57 persen dari total Kabupaten Takalar yang memiliki 14 Desa.

2). Keadaan Iklim

Curah hujan terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran atau pertemuan arus udara. Kemudian pada tahun 2016, rata-rata hari hujan dalam setahun sekitar 12 hari dengan rata-rata curah hujan sekitar 162 mm. Jumlah hari hujan banyak banyak terjadi pada bulan Februari dan bulan Desember. Sedangkan curah hujan banyak terjadi pada Bulan Februari dan Bulan Desember.

3). Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Galesong

Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Presentase
Bontoloe	1,73	6,67
Kalenna Bontongape	1,44	5,55
Bontomangape	1,04	4,01
Parambambe	2,74	10,57
Pattinoang	1,25	4,82
Boddia	3,,57	13,77
Parangmata	1,95	7,52
Galesong Kota	1,27	4,90
Galesong Baru	1,72	6,63
Palalakkang	1,74	6,71
Pa'rasangan Beru	2,00	7,71
Kalukuang	2,90	11,18
Mappakalompo	1,92	7,41
Campagaya	0,66	2,55
Galesong	25,93	100,00

Sumber Data: Kantor Kecamatan Galesong Tahun: 2019

c. Desa Pala'lakkang

1) Kondisi Geografis

a). Letak, Luas dan Batas Desa Pala'lakkang

Desa Palalakkang terletak diwilayah Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, jarak ibukota Kecamatan \pm 1 Km dan jarak dari ibukota Kabupaten \pm 20 Km. jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh kekota Kecamatan \pm 15 menit, dan \pm 1 jam menuju ibu kota kabupaten.

Luas wilayah Desa Palalakkang adalah 174 Ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut
Sebelah barat : Selat Makassar

- a. Sebelah selatan : Desa Galesong baru Kecamatan Galesong
- b. Sebelah utara : Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara
- c. Sebelah timur : Desa Kalukuang Kecamatan Galesong

b). Struktur Organisasi

Dalam struktur pemerintahan di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Di pimpin oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Urusan (Kaur). Adapun susunan pemerintahan Desa Palalakkang tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Palalakkang

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	H. Gasali dg Ngewa
2	Sekretaris desa	Abbas Nojeng
3	Kaur. Pemerintahan	Rizal Jenal
4	Kaur. Pembangunan	Syamsul Rajab
5	Kaur. Keungan	Anwar
6	Kaur. Umum	Syarifuddin

Sumber Data: Kantor Desa Palalakkang Tahun: 2019

Desa Palalakkang terdiri dari 1343 KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah Penduduk 5.469 jiwa yang tersebar di 7 Dusun. Terdiri dari 2.682 orang laki-laki dan 2.787 orang perempuan.

2) Perekonomian Masyarakat Desa

Sumber mata pencaharian pokok masyarakat Desa Palalakkang yaitu terdiri dari:

a) Sektor Pertanian

Tanaman pertanian yang di budidayakan di Desa Palalakkang mayoritas tanaman musiman seperti padi, jagung dan sayur-sayuran, sebahagian lainnya adalah tanaman jangka panjang seperti mangga, dan kelapa. Adapun luas persawahan di Desa Palalakkang yaitu 87,80 Ha.

b) Keadaan Sosial

Dalam hal tingkat kesejahteraan Masyarakat di Desa Palalakkang, kesenjangan ekonomi masyarakat tersebut masih di dominasi oleh keluarga miskin.

Dari segi pendidikan di Desa Palalakkang masih sangat memprihatinkan. Hal ini di karenakan masih banyaknya angka putus sekolah pada tingkatan sekolah dasar (SD) dengan jumlah 275 KK. Sedangkan untuk yang sementara bersekolah yang paling banyak berada pada tingkatan SD dengan jumlah 912 KK. Sedangkan bagi yang tamat dan tidak melanjutkan sekolah berada pada tingkatan SD dengan jumlah 1446 KK. Dan untuk yang tidak pernah bersekolah berjumlah 204 KK.

c) Sektor Perikanan

Dilihat dari sektor perikanan. di Desa Palalakkang terdapat nelayan yang khusus mencari telur ikan terbang (Patorani). Dimana telur ikan terbang ini sudah menjadi konsumsi masyarakat dunia. Nelayan patorani

mencari telur tersebut di perairan selat Makassar dan perairan fak-fak di daerah provinsi papua pada bulan april sampai bulan Oktober. Telur ikan terbang ini selain dijual kepasar lokal juga diekspor kemancanegara seperti jepang, Taiwan, hongkong, korea dan singapura yang rata-rata \pm 100 ton pertahun dengan harga 250/Kg. (harga tahun 2010). Selain nelayan patorani di Desa Palalakkang juga terdapat nelayan pancing (papekang) yang biasanya mendapat berbagai jenis ikan seperti ikan katamba, ikan sunu, ikan merah, dan cumi-cumi serta berbagai jenis ikan lainnya.

B. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Pesisir di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan suatu daerah yang memiliki prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa melibatkan generasi yang akan datang. Pembangunan sering juga dikatakan sebagai perbaikan kualitas hidup dengan disesuaikan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam proses pembangunan memanfaatkan sumber daya alam pembangunan yang dilakukan harus memberikan cerminan yang tidak merusak lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa tujuan, diantaranya mensejahterakan kehidupan masyarakat, mengatasi kemiskinan yang ada di setiap daerah, pendidikan yang berkualitas, ekosistem laut, industry inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, air bersih dan sanitasi layak, menyebarkan pertumbuhan ekonomi yang baik hingga membuka lapangan kerja bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum,

sehingga mampu memenuhi kemauan dan kebutuhan rakyat. Pembangunan berkelanjutan sesungguhnya ditujukan untuk meratakan pembangunan di antara masa kini dan masa untuk yang akan datang.

Dari sekian banyak konsep tentang pembangunan berkelanjutan, (Elang,2003) menyatakan 4 indikator dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu: (1). Pemerataan yang kami maksudkan disini adalah pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah diperoleh secara umum bagi masyarakat pesisir. (2). Partisipasi, keterlibatan yang aktif dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan agar sesuai dengan tujuan pembangunan. (3). Keanekaragaman adalah banyaknya program/strategi yang diberikan pemerintah bagi masyarakat pesisir baik bantuan barang dan jasa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi dan (4). Pesifik jangka panjang yang kami maksudkan pembangunan yang dilakukan terus menerus jangka panjang untuk generasi berikutnya sebagai masyarakat nelayan.

Dari uraian di atas, maka dapat dilihat penjelasan hasil penelitian berdasarkan indikator dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Pesisir di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dibawah ini:

1. Pemerataan

Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai

pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia.

Pemerataan yang kami maksudkan disini adalah peningkatan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah diperoleh secara umum bagi masyarakat pesisir di desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Menurut informan sebagai warga masyarakat nelayan terkait pemerataan peningkatan ekonomi berkelanjutan wilayah pesisir mengatakan bahwa:

“ Dengan cara memberikan dukungan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, kemudian pemerintah setempat harus memberika program pemberdayaan kepada masyarakat pesisir atau salah satu program yang harus dilakukan adalah (PEMI) pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir” (Hasil Wawancara I.D, 13 April 2019)

Berdasarkan pernyataan diatas pemerataan pembangunan pemerintah harus melalukan pendekatan dan pendataan keepada masyarakat untuk menciptakan dan membangun masyarakat pesisir melalui program-program desa yang ada. Senada dengan hasil wawancara yang disampaikan masyarakat pesisir Desa Pala'lakkang

”belum merata, karena masih banyak warga pesisir yang belum mendapatkan fasilitas untuk mencari hasil laut, dan sebagian masyarakat mendapat bantuan fasilitas kepada pelaut yang memang layak mendapatkan bantuan, namun terkadang yang mendapatkan bantuan adalah orang-orang yang sudah mampu, hal ini dikarenakan kurangnya tatap muka antara pemerintah dengan masyarakat” (Hasil wawancara M.F, 13 April 2019)

Berdasarkan pernyataan di atas tentunya dalam hal pemerataan pembangunan ekonomi pemerintah kepada masyarakat nelayan dapat dikatakan bahwa masyarakat saat ini ada perubahan dengan adanya bantuan meskipun belum merata kesemua nelayan yang membutuhkan karena masih ada yang tidak tersentuh bantuan dan ada juga masyarakat diberikan bantuan yang tergelong mampu.

Walaupun masih ada yang perlu dibenahi dalam pemeretaan pembangunan ekonomi nelayan, sudah ada perubahan yang baik dengan adanya bantuan fasilitas dan program-program pembangunan. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Kaur Keuangan Desa Pa'lalakkang bahwa:

“Masyarakat desa pa'lalakkang merasakan peningkatan ekonomi melalui program-program pemerintahan dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa pa'lalakkang” (Hasil wawancara AN, 09 April 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah melakukan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya dengan memberikan bantuan fasilitas dan program-program yang sesuai kebutuhan meskipun belum merata kesemua masyarakat yang membutuhkan tetapi masyarakat sudah merasakan adanya perubahan.

2. Partisipasi

Pendekatan pembangunan selama ini yang bersifat pasif dan seragam tidak membawa dampak positif terhadap masyarakat, karena umumnya disain pembangunan dibuat berdasarkan aspirasi kelompok dominan (*minstream*), dalam kekuasaan, modal, dan akses terhadap birokrasi. Sebagai satu kesatuan sosial, masyarakat khususnya masyarakat adat tidak diuntungkan.

Masyarakat khususnya masyarakat adat yang berada di kawasan pesisir dan laut, seringkali tidak terwakili aspirasinya dalam proses pembangunan. Padahal mereka harus diberi keleluasaan untuk melindungi dirinya dan budayanya serta menolak perubahan yang berdampak negatif bagi kehidupannya. Partisipasi, keterlibatan yang aktif dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan agar sesuai dengan tujuan pembangunan. Menurut

informan sebagai Sekretaris Camat Galesong terkait bentuk partisipasi pemerintah dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan mengatakan bahwa:

”dalam setiap pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam tentu pemerintah daerah wajib hukumnya berpartisipasi untuk membangun potensi yang dimiliki lapisan masyarakat, tentu sebagai masyarakat pesisir/nelayan yang dibutuhkan adalah bantuan modal usaha dan fasilitas sangat dibutuhkan sehingga kami memenuhi tuntutan itu, dan saya kira masyarakat sudah merasakan perubahan itu” (Hasil wawancara AR, 10 April 2019)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa partisipasi pemerintah kepada masyarakat nelayan sudah dirasakan oleh masyarakat karena pemerintah sadar akan tanggungjawabnya berusaha memenuhi tuntutan perkembangan dari masyarakatnya sehingga partisipasi pemerintah dan masyarakat saling terkait atau saling membutuhkan dalam mewujudkan kebaikan bersama. Dan dibawa ini dapat kita lihat tanggapan masyarakat terkait partisipasi pemerintah dalam membangun peningkatan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir/nelayan bahwa:

”menurut kami partisipasi pemerintah bagus, cuman perlu ditingkatkan karena masih kurangnya informasi kepada masyarakat terkait program pembangunan ekonomi, itu baru kita tahu kalo sudah ada yang dapat bantuan karena pasti jadi pembicaraan masyarakat” (Hasil wawancara J.S , 13 April 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa perilaku sadar sebagai pemerintah sudah dilakukan untuk membangun potensi yang dimiliki lapisan masyarakat dengan memberikan berupa modal usaha dan pemberian fasilitas berupa perahu dan lain-lain, dan masyarakat melihat itu sebagai usaha pemerintah yang baik, tetapi perlu di tingkatkan lagi sosialisasi atau pemberian informasi, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial karena sebagian masyarakat tahu ada

bantuan setelah menjadi pembicaraan diantara mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat pesisir Desa Pala'lakkang bahwa:

“Kurangnya tatap muka anrata pemerintah pemberi indormasi pembangunan berkelanjutan dengan masyarakat sehingga informasi pembangunan kurang di ketahui masyarakat pesisir” (Haisl wawancara, P.M, 13 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas masyarakat kurang terlibat berpartisipasi dalam pembagunan berkelanjutan. Dari pengamatan penulis melihat bahwa masyarakat desa masih menjaga kerjasama atau gotong royong dijunjung tinggi sebagai masyarakat adat pesisir sehingga.

3. Keanekaragaman

Laut memiliki kekayaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, rumput laut dan terumbu karang yang sangat luas dan beragam, demikian pula kekayaan ekosistem laut dengan berbagai jenis ikan dalam jumlah yang sangat besar.

Pemanfaatan dan pembangunan pada waktu lalu relatif lebih berat ke wilayah daratan, sedangkan pada saat ini dan pada masa depan harus diarahkan pada wilayah daratan dan wilayah perairan secara proporsional sesuai dengan kondisi yang ada agar terlaksananya pemanfaatan dan pembangunan yang efektif dan efisien. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah Kepala Desa Pa'lalakkang terkait pemanfaatan keanekaragaman pembangunan ekonomi berkelanjutan mengatakan bahwa:

Pemanfaatan dan pembangunan ekonomi merupakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pesisir lainnya pada ruang wilayah daratan dan ruang wilayah perairan secara efektif dan produktif melalui berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya dan pembangunan berupa pelatihan, mengelola hasil laut agar memiliki nilai jual tinggi, pengembangan potensi lain untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan bertujuan mencapai tingkat

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, bahkan di desa kami ibu-ibu rumah tangga sudah banyak yang memiliki usaha/penghasilan sendiri. (Hasil wawancara , H. GS 09 April 2019)

Dari pernyataan kepala desa diatas dapat dikatakan bahwa Keanekaragaman adalah banyaknya program/strategi yang diberikan pemerintah bagi masyarakat pesisir baik bantuan barang dan jasa sehingga mampu meningkatkan sejahteraan secara ekonomi, pemerintah memberikan inovasi-inovasi bagi masyarakatnya agar bisa dinikmati bukan hanya sekarang tetapi bisa dirasakan generasi selanjutnya apa yang dilakukan pemerintah setempat bertujuan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dan berikut dapat kita lihat pernyataan sebagai masyarakat pesisir/nelayan dalam hal pemanfaatan keanekaragaman pembangunan ekonomi berkelanjutan dinikmati sesuai yang diharapkan pemerintah:

“Selain pemanfaatan sumber daya laut, kami juga diberi program lain yang diberikan pemerintah yaitu kursus menjahit, dan membuat ikan abon, sebagian bercocok tanam ada yang berdagang. Dan ada sebagian kecil masyarakat yang memiliki modal besar berlayar ke luar perairan sulawesi cari telur ikan terbang (Pattorani) sampai berbulan dan hasilnya bisa sampai ratusan juta”. (Hasil wawancara , I.D, 13 April 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Pemanfaatan dan pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya alam, sumber daya manusia, berupa pelatihan, mengelola hasil laut agar memiliki nilai jual tinggi, pengembangan potensi lain untuk memenuhi kebutuhan penduduk, karena galesong bukan hanya memiliki potensi laut tetapi juga ada potensi desa bisa menunjang kebutuhan hidup masyarakatnya karena ketersediaan lahan pertanian dengan berbagai macam tanam sebagai

kebutuhan pokok masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan masyarakat pesisir Desa Pala'lakkang bahwa:

“ Melalui Dusun sebagai wakil dari desa untuk menjaga keanekaragaman sumber daya alam/laut ” (Hasil wawancara, J.S, 13 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan memberitahukan kepada masyarakat bahwa keanekaragaman sumberdaya alam/laut menjadi salah satu faktor untuk menunjang hasil dari produksi pangan dari ikan.

4. Spesifik jangka panjang

Pembangunan perspektif jangka panjang bagi rakyat dominan menilai masa sekarang yang telah lebih dari masa depan, dampak dari pembangunan yang berkelanjutan menjadi masalah yang telah mendasari nilai lain. Pandangan pandangan dalam jangka panjang merupakan pandangan pembangunan berkelanjutan sehingga sekarang ini konsep jangka pendek lebih banyak pemikir para pengambil keputusan perekonomian, maka dari itu harus di pertimbangkan.

Spesifik jangka panjang yang kami maksudkan pembangunan yang dilakukan terus menerus jangka panjang untuk generasi berikutnya sebagai masyarakat pesisir. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Pa'lalakkang mengatakan bahwa:

Pemerintah harus turuntangan dalam memberikan bantuan fisik dan permodalan, karena sebagian masyarakat bergantung hidupnya hanya dilaut maka dengan adanya bantuan perahu, mesin kapal,jaring itu sangat membantu perekonomian masyarakat pesisir, dan hasil tangkap nelayan pemerintah sudah siapkan pelelangan ikan agar harga tetap terjangkau, dan ada juga sebagian masyarakat hasil tangkapannya di bawa keluar daerah dengan ketersediaan ini semua tentu ini bisa berdampak jangka panjang. (Hasil wawancara , H. GS, 09 April 2019).

Dari pernyataan kepala desa diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan atau memfasilitasi masyarakatnya dengan memberikan berbagai bantuan yang dibutuhkan mulai dari pemberian alat tangkap baik perahu, mesin dan jaring sampai pada tempat pelelangan ikan yang disediakan sebagai pusat perputaran ekonomi masyarakat pesisir/nelayan. Dan berikutnya dapat kita lihat tanggapan dari salah seorang masyarakat pesisir terkait apakah program peningkatan ekonomi berkelanjutan pesifik jangka panjang:

“jika semboyang masyarakat adat-istiadat galesong masih dijalankan dengan baik yang terkenal sebagai pelaut tau barani, itu akan dirasakan manfaatnya generasi berikutnya, dan tentu sangat diharapkan kepada pemerintah selalu memberikan pendampingan yang baik bagi masyarakatnya masalah-masalah yang dibutuhkan dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian laut agar kami bisa mendapatkan hasil baik pula. (Hasil wawancara , M.F, 13 April 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatan bahwa pemerintah sudah menyiapkan tahapan-tahapannya tentang bagaimana masyarakat pesisir bisa berkembang secara ekonomi dan dapat diteruskan sebagai mata pencaharian yang menjanjikan untuk masa depan generasi selanjutnya. Dan sekarang tergantung masyarakat apakah bisa bertahan, menjaga dan menjalankan atau mengembankan sumber ekonomi yang sudah tersedia. Sebagaimana hasil wawancara masyarakat pesisir Desa Pala'lakkang bahwa:

“kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi dengan program-program pemerintah yang melalui musyawara desa dan musrembang” (Hasil wawancara, P.M, 13 April 2019).

Bersadarkan hasil wawancara diatas pembangunan berkelnajutan pada hakikatnya untuk kesejahteraan masyarakat pesisir di masa kini maupun masa yang akan datang.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Bagi Masyarakat di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir telah dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Namun, upaya-upaya yang telah diterapkan tersebut masih belum efektif terutama dalam merubah pandangan masyarakat sebagai fokus utama pembangunan. Apalagi sebagian besar program berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan dominasi peran birokrasi dalam pembangunan. Birokrasi menjadi aktor utama dalam perencanaan, Pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan. Pendekatan pembangunan dengan model ini mengakibatkan terjadinya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah yang diimplementasikan melalui program yang dibuat. Beberapa program pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat, pada kenyataannya cenderung mengalami kegagalan dimana masyarakat cenderung hanya diposisikan sebagai objek pembangunan. Di bawah ini dapat kita lihat penjelasan faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu:

1. Faktor Pendukung dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses sumber daya pembangunan, didorong untuk

meningkatkan kemandiriannya didalam mengembangkan kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat adalah acara atau proses siklus yang berkelanjutan, partisipasi antara masyarakat yang bekerja sama didalam golongan informal maupun formal untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman dan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekedar proses semata. Berikut penjelasan faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan di desa palalakkang.

a. Bantuan Alat tangkap

Konsistensi dan sinergitas antar pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan harus ada dalam proses itu. Kemudian, harus ada pendampingan kepada nelayan selama masa adaptasi alat tangkap baru. Itu sangat dibutuhkan oleh nelayan dan perempuan nelayan. Sehingga nelayan tidak akan terbebani selama masa adaptasi. Di sisi lain, Susan menambahkan, Pemerintah juga perlu memfasilitasi nelayan dalam inovasi teknologi alat penangkapan ikan yang mutlak diperlukan di masa sekarang. Dengan teknologi, dia meyakini tidak hanya akan menguntungkan secara ekonomi, namun juga mendukung keberlanjutan ekologi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Pa'lalakkang terkait bantuan alat tangkap bagi masyarakat nelayan mengatakan bahwa:

“Pemerintah sudah berusaha memberikan bantuan bagi masyarakat berupa alat tangkap jaring, perahu piber, mesin perahu dan kail pancing, bantuan yang diberikan ini tentu sangat membantu meningkatkan hasil tangkapan dengan ketersediaan fasilitas untuk meningkatkan kualitas sebagai masyarakat nelayan . (Hasil wawancara , H. GS, 09 April 2019).

Dari pernyataan kepala desa diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan atau memfasilitasi masyarakatnya dengan memberikan berbagai bantuan yang dibutuhkan mulai dari alat tangkap jaring, perahu piber, mesin perahu dan kail pancing sebagai pusat perputaran ekonomi masyarakat pesisir/nelayan. Dan berikutnya dapat kita lihat tanggapan dari salah seorang masyarakat pesisir terkait masalah bantuan alat tangkap yang diberikan masyarakat nelayan mengatakan bahwa:

“pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat apa-apa yang dibutuhkan dalam meningkatkan hasil tangkapan dan sudah dirasakan manfaatnya meskipun bantuan ini belum merata bagi masyarakat, dan harapan kami bagi pemerintah masyarakat bukan hanya butuh alat tangkap tetapi surat izin berlayar dan modal usaha”. (Hasil wawancara , P.M, 13 April 2019).

Sebagaimana yang dinyatakan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah memfasilitasi alat tangkap bagi masyarakat nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan yang lebih baik meskipun dirasakan belum merata distribusi bantuan alat tangkap bagi masyarakat tetapi sudah dirasakan manfaatnya.

b. Tempat Pelelangan Ikan

Tempat pelelangan ikan (TPI) di Beba' Galesong merupakan suatu kelembagaan ekonomi yang didalamnya terdapat transaksi jual beli antara nelayan dan pedagang yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan nelayan. Dengan berkembangnya segala aktifitas dan hasil laut yang semakin berlimpah, maka perlu adanya pengembangan tempat pelelangan ikan dan sarana prasarana nelayan di Galesong Kabupaten Takalar.

Menurut informan sebagai Sekertaris Camat Galesong dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan ketersediaan pelelangan ikan TPI mengatakan bahwa:

”melihat potensi hasil tangkapan ikan masyarakat galesong maka pemerintah berinisiatif melakukan terobosan yang bermanfaat bagi nelayan dengan disediakannya tempat pelelangan ikan di Beba dan lanna untuk memperlancar kegiatan pemasaran dengan system lelang sehingga harga bias diterkontrol dengan baik demi kebaikan bersama” (Hasil wawancara AR, 10 April 2019)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa terkait ketersediaan pelelangan ikan pemerintah sudah menyiapkan dua tempat pelelangan ikan terbesar di kabupaten takalar khususnya di galesong yaitu di *beba* dan di *lanna* pemerintah menyediakan TPI di galesong untuk memperlancar pemasaran dan control harga untuk menyalurkan hasil tangkapan ikan. Dan dibawa ini dapat kita lihat tanggapan masyarakat terkait ketersediaan pelelangan ikan dalam membangun peningkatan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir/nelayan bahwa:

”dengan adanya pelelangan ikan kami sebagai nelayan sangat terbantu karena memperoleh harga baik bagi nelayan, memperkecil tengkulak ikan dan dapat mempermudah pembinan mutu ikan hasil tangkapan nelayan” (Hasil wawancara J.S ,13 April 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa adanya pelelangan ikan di galesong sebagai pemusatan ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan dengan mempermudah kegiatan pemasran dengan sistem lelang ini berdampak baik bagi peningkatan nelayan karena hasil tangkapan ikan berapapun banyaknya akan habis terjual dengan pembayaran tunai. Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional di *beba* dan *Lanna* yang disediakan untuk memfasilitasi kegiatan jual beli. Dari hasil wawancara masyarakat pesisir Desa Pala'lakkang mengatakan bahwa:

“demgan adanya tempat pelelangan ikan dan beberapa bantuan yang diberikan kepada masrakat nelayan memudahkan para nelayan untuk mengetahui harga pasar megalami penurunan atau kenaikan” (Hasil wawancara M.F, 13 April 2019).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat untunk memperkuat sector pendapatan masyarakat baik permasalahan tempat tempat pelelangan ikan maupun alat tangkap ikan walaupun belum merata kesemua masyarakat.

Dari hasil observasi peneliti, memang ada tempat pelelangan ikan yang berada pada Dusun Beba' Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, dimana seluruh masyarakat Galesong, baik Galesong selatan, Galesong Kota, dan Galesong Utara hampir seluruh nelayan yang dari laut menangkap ikan menjual hasil tangkapan mereka di Pelelangan Ikan Beba', sepanjang pesisir pantai para nelayan yang kembali dari laut menjual hasil tangkapan berbagai jenis ikan kepada para *Pagandeng*. Istilah pagandeng bahasa Makassar yang bearti pemboceng sepeda atau sepeda motor. Tempat pelelangan ikan merupakan lokasi transaksi jual beli ikan, dari nelayan dengan para pembeli yang dominan para pagandeng dan masyarakat lain. Proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. Selain tempat pelelangan ikan merupakan transaksi jual beli ikan. Pelangan ikan di Beba' juga menjadi wisata kuliner karena banyak masyarakat setempat yang membuka usaha warung makan untuk para pengunjung yang datang kepelelangan.

2. Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Masyarakat pesisir Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, dimana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Perairan pantai galesong sangat mendukung usaha nelayan dalam penangkapan ikan sebagai sumber pencahariannya sebagian penduduk masyarakat

berpencaharian sebagai nelayan yang turun temurun dari nenek moyang mereka. Karakteristik nelayan berbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang dimilikinya, sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal nelayan harus berpindah-pindah tempat dalam mencari. Seperti masyarakat kebanyakan, masyarakat nelayan juga menghadapi masalah sosial ekonomi yang banyak. Pemanfaatan potensi laut yang ada menjadi kebiasaan masyarakat pesisir dalam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

a. Surat Izin

Ihwal kebijakan dan perizinan kapal angkut ikan jadi persoalan pelik bagi Pemerintah Sulawesi-selatan khususnya Kecamatan Galesong. Meski telah disosialisasikan dan diberikan kelonggaran melengkapi izin sejak awal tahun ini, namun banyak pelaku usaha belum puas. Padahal, ikan di laut *fak-fak Papua barat* sedang melimpah, nelayan dan pengusaha bisa tersandung jika kendala ini tak segera dibeskan.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Republik Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan. Menurut informan sebagai warga masyarakat nelayan terkait surat izin berlayar bagi nelayan mengatakan bahwa:

“masyarakat nelayan dari dulu selalu tertendala masalah surat isin melaut ke Fak-fak Papua Barat tertama patorani dan untuk keluar memanggapi ikan di daerah Fak-fak Papua Barat nelayan harus membawa surat isin dari pemerintah daerah tempat asalnya, akan tetapi masyarakat selalu di persulit dalam pengurusan surat izin”

Berdasarkan hasil wawancara diatas pembangunan pemerintah kepada masyarakat terkhusus nelayan yang berada diwilayah pesisir Desa Pala'lakkang sangat membutuhkan surat izin berlayar dan surat izin penangkapan ika. Senada dengan yang dikatan masyarakat pesisir Desa Pala'lakkang bahwa:

”dari dulu hingga sekarang nelayan masyarakat galesong selalu terkendala masalah surat izin berlayar ke fak-fak Papua Barat khususnya para patorani, karena untuk menangkap ikan diperairan wilyah diluar Sulawesi-selatan maka harus ada surat izin dari dinas perikanan dan kelautan kabupaten takalar, dinas terkait selalu mempersulit pengurusan izin entah apa sebabnya pemerintah mengulur-ulur waktu pengeluran surat izin sehingga masyarakat mengalami kerugian karena telur ikan terbang ada waktu panen sehingga kapan dilewatkan maka masyarakat rugi tenaga dan uang sampai ratusan juta ” (Hasil wawancara M.F , 13 April 2019)

Berdasarkan pernyataan di atas tentunya dalam hal surat izin berlayar pemerintah kepada masyarakat nelayan dapat dikatakan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan kemudahan surat izin berlayar, surat izin menjadi kendala bagi keleluasaan masyarakat dalam menangkap ikan, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Takalar ketika benar-benar memiliki komitmen untuk membangun ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir maka harus diberikan pelayanan yang baik terutama surat izin berlayar. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Kaur Keuangan Desa Pa'lalakkang bahwa:.

“pemerintah desa dalam hal pemerian surat izin bagi masyarakat nelayan di galesong sudah kami perjuangkan tetapi ini masalah yang dihadapi kami sampai hari ini belum ada kejelasan, dan masyarakat juga dengan dampingan mahasiswa dan LSM memperjuangkan denagn beberapa kali melakukan aksi demonstrasi tapi tetap tidak ada hasil yang baik ” (Hasil wawancara AN, 09 April 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat terkendala surat izin berlayar sehingga para patorani mengalami kerugian yang banyak bisa sampi ratusan juta karena modal untuk berlayar hasil dari pinjaman dari bank

sehingga kapan tidak berlayar maka nelayan rugi dua kali. Pemerintah setempat juga tidak bias berbuat banyak untuk membantu karena yang punya otoritas penuh dalam memberikan surat izin adalah dinas perikanan dan kelautan kabupaten takalar.

Dari hasil observasi peneliti, masyarakat galesong (patorani) melakukan aksi unjuk rasa di Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, pada hari Senin 22 April 2019, ratusan nelayan dari tiga kecamatan yakni Galesong Selatan, Galesong dan Galesong Utara para nelayan menuntut adanya surat izin berlayar ke perairan Fak-fak Kabupaten Fak-fak Papua Barat.

Terkait dengan sulitnya mendapatkan surat persetujuan berlayar dimana peraturan berbunyi, Nelayan kecil pemilik kapal berukuran dibawah 10 GT di Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT), Fak-fak Papua Barat, mengeluhkan tumpang tindihnya perizinan kapal dan perikanan sehingga menyulitkan mereka untuk menangkap ikan di lautan. Sesuai dengan UU No.17/2008 tentang Pelayaran dan UU No.45/2009 tentang Perikanan mewajibkan kapal yang berlayar memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sedangkan penerbitan SPB (*port clearance*) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.3/Permen-KP/2013 dan Permenhub No.82/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan, disyaratkan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Padahal dokumen SIUP, SIPI/SIKPI sesuai Permen KP No.30/MEN/2012 pasal 12 dikecualikan bagi nelayan kecil, pemerintah, pemerintah daerah atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Sementara dalam UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT.

Dengan peraturan itu maka nelayan kecil seharusnya tidak perlu mengurus Surat Layak Operasi (SLO). Permasalahannya nelayan kecil harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk melaut syarat pengurusan SPB, harus sudah memiliki SLO.

b. Modal Usaha

Perguliran dana ekonomi produktif memungkinkan berkembangnya alat tangkap serta usaha budidaya nelayan dan masyarakat pesisir. Dari alat tangkap tradisional menjadi alat tangkap modern. Dari usaha budidaya yang bersifat subsisten menjadi usaha budidaya yang bersifat komersial. Jika ini terjadi, merupakan suatu perubahan awal yang baik untuk mengeluarkan masyarakat pesisir dan nelayan dari lingkaran kemiskinan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Pa'alakkang terkait bantuan modal usaha bagi masyarakat nelayan mengatakan bahwa:

“Bantuan modal yang bergulir saat ini hanya dari PKH program keluarga harapan dan dana ini diberikan berapa jumlahnya tergantung berapa anak tanggungan dalam keluarga, modal usaha pernah ada dari Modal BUMdes desa tetapi sudah tidak bergulir lagi karena macet dipembayaran ansuran. Meskipun modal usaha adalah hal yang penting bagi masyarakat tetapi ada yang lebih penting dari untuk penyaluran bantuan yaitu alat tangkap atau fasilitas yang dibutuhkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat pesisir serta sumber daya manusianya ibu-ibu deberi pelatihan untuk mengolah

abon ikan agar memiliki penghasilan sendiri (Hasil wawancara , H. GS 09 April 2019).

Dari pernyataan kepala desa diatas dapat dikatakan bahwa pemeberian modal usaha dari desa pernah ada tetapi karena masyarakat menganggap bantuan itu untuk dihabiskan, sementara sebelum diberi bantuan sudah ada sosialisasi sebelumnya sebagai dana pinjaman dari Bumdes desa. Dan berikutnya dapat kita lihat tanggapan dari salah seorang masyarakat pesisir terkait masalah bantuan modal usaha yang deberikan masyarakat nelayan mengatakan bahwa:

“sudah puluhan tahun saya jadi nelayan belum pernah merasakan bantuan dana tunai berupa uang dari pemerintah sebagai modal usaha untuk melengkapi kebutuhan sebagai nelayan untuk meningkatkan ekonomi, kamilah berusaha sendiri cari modal jika perahu dan alat tangkap lain mengalami kerusakan”. (Hasil wawancara , P.M , 13 April 2019).

Pemerataan kesejahteraan antar masyarakat pesisir dan nelayan untuk generasi yang sekarang bisa terjadi. Tetapi bantuan modal yang diberikan tidak diikuti dengan aturan-aturan tentang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan. Perbaikan alat tangkap dapat meningkatkan produktivitas nelayan. Tetapi tidak ada aturan tentang jumlah maksimal setiap species ikan yang boleh dieksploitasi setiap hari atau setiap musimnya sehingga ketersediaan ikan dilaut tidak punah dan menjadi lestari, terutama untuk ikan-ikan langka dan memiliki nilai ekonomis penting. Berkembangnya usaha budidaya yang berorientasi profit memberikan peningkatan pendapatan bagi pembudidaya. Tapi disisi lain akan terjadi pengrusakan terhadap sumberdaya perikanan lainnya seperti hutan mangrove. Keberadaan ekosistem mangrove memiliki arti penting dalam kelestarian lingkungan pesisir dan lautan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan apa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Pembangunan berkelanjutan sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan diantara masa kini dan masa yang akan datang. Konsep tentang pembangunan berkelanjutan maka telah di rumuskan 4 elemen di antaranya yaitu: (4) komponen yang patut untuk diperhatikan; 1. Pemerataan, 2. Partisipasi, 3. Keanekaragaman, 4. Spesifik jangka panjang, Elang (2003).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan masyarakat pesisir di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. a). Pemerataan; belum merata kesemua nelayan, b). Partisipasi; masih perlu ditingkatkan karena masih kurangnya informasi kepada masyarakat terkait program pembangunan, c). Keanekaragaman; Selain pemanfaatan sumber daya laut, masyarakat diberi program lain oleh pemerintah d), Spesifik jangka panjang; pemberian alat tangkap penyediaan ini sebagia tujuan jangka panjang.

Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar 1). *faktor pendukung*: (a). Bantuan Alat tangkap; bantuan bagi masyarakat berupa alat tangkap jaring, perahu piber, mesin perahu dan kail pancing, bantuan yang diberikan ini tentu sangat membantu meningkatkan hasil tangkapan dan b) Tempat Pelelangan Ikan; Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional di beba dan Lanna yang disediakan untuk

memfasilitasi kegiatan jual beli. 2). *Faktor Penghambat*: (1). Surat Izin ; masyarakat galesong selalu terkendala masalah surat izin berlayar ke Fak-fak Papua Barat khususnya para patorani. (b). Modal Usaha; bantuan modal yang diberikan tidak diikuti dengan aturan-aturan tentang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan wilayah pesisir Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan masyarakat pesisir di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. a). Pemerataan; belum merata kesemua nelayan yang membutuhkan karena masih ada yang tidak tersentuh bantuan dan ada juga masyarakat diberikan bantuan yang tergelong mampu b). Partisipasi; partisipasi pemerintah kepada masyarakat nelayan sudah dirasakan oleh walaupun masih perlu ditingkatkan karena masih kurangnya informasi kepada masyarakat terkait program pembangunan. c). Keanekaragaman; Selain pemanfaatan sumber daya laut, masyarakat diberi program lain yang diberikan pemerintah yaitu kursus menjahit, dan membuat ikan abon, sebagian bercocok tanam ada yang berdagang dan d), Pesifik jangka panjang; pemberian alat tangkap baik perahu, mesin dan jaring sampai pada penyediaan tempat pelelangan ikan yang disediakan sebagai pusat perputaran ekonomi masyarakat pesisir/nelayan penyediaan ini sebagai tujuan jangka panjang
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar 1). *faktor pendukung*: (a). Bantuan Alat

tangkap; bantuan bagi masyarakat berupa alat tangkap jaring, perahu piber, mesin perahu dan kail pancing, bantuan yang diberikan ini tentu sangat membantu meningkatkan hasil tangkapan dan b) Tempat Pelelangan Ikan; Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional di beba dan Lanna yang disediakan untuk memfasilitasi kegiatan jual beli. 2). *Faktor Penghambat:* (1). Surat Izin ; masyarakat galesong selalu terkendala masalah surat izin berlayar ke fak-fak jaya pura khususnya para patorani. (b). Modal Usaha; bantuan modal yang diberikan tidak diikuti dengan aturan-aturan tentang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan.

B. Saran

Adapun sebagai saran Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah setempat diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan tanpa diskriminasi ada diberi bantuan ada yang tidak, ini perlu sosialisasi lebih baik lagi agar pemberian bantuan bias merata.
2. Perlu ada perhatian dalam pengembangan sumber daya kelembagaan agar masyarakat bisa meningkatkan ekonominya lebih baik kedepan
3. surat izin menjadi kendala bagi keleluasaan masyarakat dalam menangkap ikan, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Takalar ketika benar-benar memiliki komitmen untuk membangun ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Madekhan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Peubahan*. Malang. Averroes Press.
- Arief, Y.L. 2014. *Studi Tentang Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Pelabuhan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. 2 (2) (2014): 133-140
- Bappenas.2015. *Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019*.Jakarta
- Bengen DG. 2004. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
- Brundtland,G,H. 2001. *Report Of The World Commission On Environment and Development*. T5he United Nation.
- Dahuri et al, 2008,. *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. Naskah Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Email. 2006. *Pengelolaan Lingkungan dalam Pembangunan*. IPB. Bogor.
- Elang, Lilik, 2003,.*Kumpulan Makalah Perubahan Lingkungan Global dan kerjasama Internasional*, IPB.
- Fauzi Ahmad, Alex Oxtavianus. 2014. *The Measurement Of SustainableDevelopment In Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 15, Nomor 1, Juni. Bogor: Agricultural Univercity.
- Herry Fitriansah. 2012. *Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarkat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Volume 8 (4) 360-370 Desember.
- Kartasasmita Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo :Jakarta.
- Kementrian Lingkungan Hidup. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012*.Jakarta
- Lewaherilla, N.E. 2002. *Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan*. Makalah Program Pasca Sarjana/ S3. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Niken Pratiwi, dkk, 2018. *Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur*. JIEP-Vol. 18, No 1, Maret.
- Penuluh, S., & Fitri, M R. 2016. *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)*. Indonesia.

Rahadian, A.H. 2016. *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*. ISSN 2355-2883 Volume 3, Nomor 1, Februari. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

Tuwo, Ambo.,2011. *Pengelolaan Ekowisata dan Laut*. Surabaya. Brillian Internasional.

Sutamihardja, 2004.,*Perubahan Lingkungan Global*; Program Studi Pengelolaan

Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Alfabeta, Bandung.

Wahyuningsi. 2017. *Millenium Developmet Goalds (MDGs) Dan Sustaineble Development Goalds (SDGs) Dalam Kesejaht5eraan Sosial*. Vol. 11, No. 3, September. Jurnal Bisnin Dan Mnajemen.

Dokumen

Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar 2016

Pemerintah Kabupaten Takalar, Rencana Strategis Pembangunan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa = RPJMDES 2011-2015), (Takalar: Desa Palalakkang, 2011)



LAMPIRAN



Nama : NUR RAHMA

Nim : 105640233615

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

Wawancara Dengan Masyarakat P.M



Wawancara Dengan Masyarakat M.F



Wawancara Dengan Sekcam Galesong A.R



Suasana Penjualan ikan di pelangan ikan Beba”



Aksi Unjuk rasa masyarkat galesong (Patorani) terkait surat izin di Kantor Dibas Perikanan Kabupaten Takalar



RIWAYAT HIDUP



NUR RAHMA, Dilahirkan di Kabupaten Takalar tepatnya di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang Kecamatan Galesong pada hari Jum'at tanggal 22 juli 1997. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Ramli Dg Beta dengan Salma Dg Kaca. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Neg. 115 Inpres Galesong di Kecamatan Galesong

Kabupaten Takalar pada tahun 2008, pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikannya di SMPN 2 Galesong di Kecamatan Galesong dan tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Galesong Utara pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP). Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2019.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Nur Rahma
Nomor Stambuk : 10564 02336 15
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Wilayah Pesisir Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)	23/6-2019	
2	Dr. Abdul Mahsyar, M.Si	26/6-2019	
3	Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	24/6-2019	
4	Dr. Abdi, M.Pd	22/6/19	

Makassar, 2018

Mengetahui :
Ketua Jurusan

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

LEMBAR KETERANGAN HASIL PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Nur Rahma
Stambuk : 10564 02336 15
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul Proposal : Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Wilayah Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Petani Desa Pa'lalakang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)	-	-
2	Dr. Nuryanti Mustari, S. IP., M.Si	29/3/2019	
3	M. Amin Umar, S.Ag., M.Pd.I	26/3/2019	
4	Ahmad Taufik, S.IP., MAP	26/3/2019	

Makassar,

2019

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

Pembimbing II

Dr. Abdi M. Pd

Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13598/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Takalar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 989/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 30 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NUR RAHMA**
Nomor Pokok : 105640233615
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN WILAYAH PESISIR DESA PALA" LAKKANG
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 April s/d 06 Juni 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 01 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No.26 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar

Takalar, 09 April 2019

Nomor : 179/IP-DPMPTSP/IV/2019
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a,
Yth. Kepala Desa Pala'lakkang
Kec. Galesong Kab. Takalar
Di-
Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul-Sel nomor : 13598/S.01/PTSP/2019, tanggal 01 April 2019, perihal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : **NUR RAHMA**
Tempat/Tanggal Lahir : Bontojai, 22 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar
Alamat : Maccini Ayo Desa Pa'lalakkang Kec. Galesong
Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

***"PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN WILAYAH PESISIR DESA
PALA'LAKKANG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR"***

Yang akan dilaksanakan : 06 April s/d 06 Juni 2019
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.

Kepala Dinas



BUDIAR ROSAL, S.STP, M.Adm.Pemb

Pangkat : Pembina Tk.1

NIP : 19800520 199810 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Kantor Kesbagpol Kab. Takalar di Takalar;
4. Camat Galesong Kab. Takalar di Takalar;
5. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
6. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail : lp3m@umma.ac.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 989/05/C.4-VIII/III/1440/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 Rajab 1440 H
30 March 2019 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPM Makassar
di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0854/FSP/A.6-VIII/III/1440 H/2019 M tanggal 30 Maret 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NUR RAHMA
No. Stambuk : 10564 0233615
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Wilayah Pesisir Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 April 2019 s/d 6 Juni 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716